

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setiap negara selalu memiliki upaya tersendiri dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menarik sebanyak mungkin investasi yang masuk. Investasi dipercaya dapat memperbaiki pertumbuhan perekonomian suatu negara. Indonesia salah satunya, negara berkembang yang membutuhkan adanya modal atau investasi jumlah besar untuk menuju industrialisasi. Dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Agar dapat terwujud, maka perlu adanya iklim investasi yang kondusif.

Di Indonesia, memberikan kemudahan-kemudahan investasi oleh pemerintah kepada para pengusaha adalah upaya untuk ‘mengabadikan’ kekuasaan pemerintah, seperti dengan adanya bebas pajak, ijin khusus, dan lainnya. Hal ini disebut sebagai *Crony Capitalism* atau kapitalisme kroni yang dimaknai sebagai kapitalisme suatu negara yang dibentuk berdasarkan kedekatan para penguasa dengan pihak pemerintah. Kemudahan-kemudahan tersebut ditetapkan pula oleh pemerintah di tingkat lokal, seperti Batam yang kemudian menjadikan Indonesia berada pada posisi ke-7 dalam indeks Kapitalisme Kroni 2016 versi The Economist.

Posisi Batam yang strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris dan berada dekat dengan negara yang tergolong maju, seperti Singapura menjadikannya sasaran investasi bagi para investor asing dari beberapa negara di dunia. Meskipun di tahun 2013-2014 nilai realisasi investasi asing terbilang rendah,

upaya pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah di Batam, yaitu Badan Pengusahaan Batam terus digesa. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus berinovasi menciptakan program layanan kemudahan investasi serta memudahkan regulasi dalam menanamkan modalnya di Indonesia, tepatnya di Batam.

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai realisasi investasi asing di tahun 2015 hingga 2017. Pergerakan nilai investasi asing di Batam di tahun 2015 lebih meningkat dari tahun sebelumnya, yang kemudian meningkat lebih drastis lagi di tahun 2016 hingga pada tahun 2017 dapat dikatakan bahwa tahun ini adalah puncak nya.

Terdapat dua (2) faktor yang menjadi penyebab meningkatnya investasi asing di Batam pada tahun 2015 hingga 2017, yaitu Deregulasi dan Infrastruktur. Dalam mendukung pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menekan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada akhir tahun lalu. Batam, memiliki dua pilihan fasilitas investasi, yaitu FTZ (Free Trade Zone) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang menjadi deregulasi dalam mendongkrak nilai investasi asing. Tujuan dari pembentukan FTZ ini adalah untuk meningkatkan investasi pada suatu daerah, dimana bea dan kuota dihapuskan dan kebutuhan untuk birokrasi ditekan rendah guna menarik perusahaan-perusahaan dengan menambahkan intensif kegiatan usaha. Pemerintah Pusat memberikan empat (4) keunggulan yang tercantum dalam Undang-Undang Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, yaitu (1) Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (2) Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN-BM), (3) Bea Masuk, dan (4) Bea Keluar.

Sementara, fasilitas lainnya seperti KEK hampir sama dengan FTZ, perbedaannya adalah bahwa KEK memiliki skala yang lebih kecil. KEK adalah pilihan fasilitas investasi selain FTZ dimana bila investor berinvestasi

melalui KEK barang yang dihasilkan dapat dikirim terlebih dahulu ke wilayah lain dalam negeri. Dengan menggunakan fasilitas KEK, calon investor akan mendapatkan 14 poin kemudahan, diantaranya 1). Investment Allowance, 2). Amortisasi dipercepat, 3). Pajak Dividen, 4). Kompensasi kerugian yang lebih lama, 5). Tax Holiday, 6). Fasilitas Pembebasan PPh Pasal 22 impor, 7). PPN impor tidak dipungut, 8). PPN pembelian dalam negeri tidak dipungut, 9). Pembebasan PPN dan atau PPnB, 10). Penyerahan tidak dipungut kepada penerima fasilitas lainnya, 11). Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, 12). Penangguhan Bea Masuk, 13). Pembebasan Bebas Masuk dan cukai, dan 14). Keringanan Bea Masuk.

Faktor penyebab meningkatnya investasi asing di Batam tahun 2015-2017 lainnya adalah infrastruktur. Dalam upaya mencapai tujuan pengembangan Batam sebagai daerah industri, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik untuk memudahkan kelancaran investasi berupa infrastruktur berupa penambahan jumlah waduk/dam, pembangunan *flyover* atau jembatan layang, dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Sedangkan, pembangunan nonfisik dilakukan untuk menarik minat investor, berupa kemudahan fasilitas. Kemudahan fasilitas yang diciptakan oleh BKPM dan dilanjutkan oleh BP Batam adalah KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) dan i23J (Izin Investasi 3 Jam). KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) merupakan salah satu program BKPM yang diresmikan tahun 2016 guna mempermudah investor dalam pengerjaan konstruksi. Setelah memperoleh izin prinsip (IP), investor tidak perlu menunggu waktu yang lama dalam membangun proyek. Keunikan dari inovasi BKPM yang dilanjutkan oleh BP Batam ini adalah dengan menggunakan layanan i23J, investor akan menerima “Produk 8”. “Produk 8” adalah 8 perizinan yang akan langsung didapatkan oleh investor, diantaranya

adalah Izin investasi, Akta perusahaan dan pengesahan, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) , Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan demikian, faktor-faktor penyebab meningkatnya investasi asing di Batam tahun 2015 hingga 2017 diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus menciptakan terobosan baru lainnya agar nilai investasi asing di Indonesia, tepatnya Batam terus signifikan. Mengingat Batam adalah salah satu kawasan industri di Indonesia yang menjadi target bagi investor asing. Selain infrastruktur yang memadai, kemudahan layanan investasi dan kepastian hukum sangat diperlukan bagi calon pelaku usaha.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Mengenai isu dualisme di Batam, sudah semestinya BP Batam dan Pemerintah Kota Batam saling bahu-membahu dalam membangun Kota Batam meskipun memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda.
2. Dalam menjaga iklim investasi yang kondusif tidak hanya dengan membangun beragam infrastruktur, namun juga harus tetap memelihara dan mengawasi infrastruktur yang telah dibangun. Karena, terdapat beberapa titik di Kota Batam, utamanya jalan mengalami kerusakan seperti adanya lubang-lubang yang membuat siapapun yang melaluinya jadi tidak nyaman. Terlebih lagi jika hujan dan lubang-lubang tersebut tertutupi oleh genangan air hujan, tentu saja dapat membahayakan pengendara, utamanya pengendara sepeda motor.
3. BP Batam mungkin dapat menggunakan atau mempertahankan kebijakan-kebijakan yang sekiranya mampu meningkatkan nilai investasi asing di Batam untuk tahun-tahun berikutnya.

4. Kepala BP Batam seharusnya menjelaskan kepada masyarakat setempat maupun calon investor asing bahwa FTZ dan KEK adalah sebuah pilihan, sehingga dapat dipahami dan tidak salah dalam memberikan informasi.
5. Terkait tenaga kerja asing, Pemerintah Batam seharusnya dapat membatasi jumlah tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan di Batam, seperti hanya tenaga ahli saja. Karena, masih banyak SDM lokal yang berkompeten dalam banyak bidang.